



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ESTTY PURWADIANI HIDAYATIE**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **33227**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **8.073.417.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/242 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.185.358.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/40 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 52.896.000
3. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 141.520.000
4. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 48.256.000
5. Tanah Seluas 275 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 127.600.000
6. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , Rp. 900.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 484 m2/199 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.932.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 451 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.516.855.000
9. Tanah Seluas 110 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
10. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	127.000.000
1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	
11.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
6.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	
110.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	801.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	366.367.666
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.367.784.666
III. HUTANG	Rp.	280.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.087.784.666

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.